

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M. , and R. Akbar. 2017. Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah: Semu atau Nyata. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, Vol.21, No.2, p.105-117
<http://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/10535>
- Ahyaruddin, M., and R. Akbar. 2018. “Indonesian Local Government’s Accountability and Performance: The Isomorphism Institutional Perspective”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi (JAI)*, Vol.19, No.1, p.1-11.
- Ahyaruddin, M., and R. Akbar. 2016. “The Relationship between the Use of a Performance Measurement System, Organizational Factors, Accountability, and the Performance of Public Sector Organizations”. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, Vol.31, No.1, p.1-22.
- Akbar, R., R. Pilcher, and B. Perrin. 2015. “Implementing Performance Measurement Systems: Local Government under Pressure”. *Qualitative Research in Accounting and Management (QRAM)*, Vol. 12 (1), 3-33.
- Anthony, Robert N. and Vijay Govindarajan. 2007. *Management Control Systems*. 12Th Edition. New York: Mc Graw-Hill International Edition.
- Baskoro, F.R. , and R. Akbar. 2018. Mengevaluasi Sistem Pengukuran Kinerja di Instansi Publik: Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia (JATI)*, Vol.1 No.2, p.52-63
<http://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/4316>
- Bleskadit, N.H. 2018. Evaluasi Indikator Kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Tesis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta
- BPKP dan LAN (2000), Modul 4: Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, LAN
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks, California, USA: SAGE Publication.
- DiMaggio, P.J and Powwel, W.W. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review* 1983, Vol. 48 (April:147-160). Yale University.
- Giantini, D. 2014. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan *Good Governance*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pasudan Bandung.

- Hennink, M, Hunter, I, Bailey, I. 2012. *Qualitative Research methods*. Los Angeles : Sage Publication Ltd
- Hesda, A.R. 2016. Integrasi Antar Dokumen Perencanaan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/artikel/integrasi-antar-dokumen-perencanaan>. Diakses 25 Februari 2019.
- Kementerian Keuangan. Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Tahun 2018.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. 2019. Reformasi Birokrasi tentang Permasalahan dan Tindak Lanjut ke depan. <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/permasalahan-dan-tindak-lanjut-ke-depan>. Diakses pada 14 Mei 2018 pukul 11.30 WIB.
- Knowlton, Lisa. Wyatt dan Cynthia C. Philips. 2013. *The Logic Model Guidebook Better Strategies for Great Results* Edisi 2. SAGE Publication: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC.
- Longo, F. 2002. Analytical Framework for Institutional Assessment of Civil Service System. Barcelona: ESADE. Institute of Public Leadership and Management.
- Mahboubeh, F and Behmanesh, MR. 2012. *New Public Management Approach and Accountability*. International Journal of Management, Economics and Sosial Sciences, Volume 1 (2), hlm. 42-49
- Mahmudi. 2013. *Management Kinerja Sektor Publik Edisi 2*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahsun, M. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- Moleong, L.J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penentuan Indikator Kinerja Menggunakan Kriteria SMART

- Pustakawan. 2015. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta. Tesis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta
- Raharja, E.L. 2018. Strategi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor. Tesis. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Rahmat, M. 2016. Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Tesis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK. 01 Tahun 2016 Perubahan atas PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Jakarta
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/ KMK. 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan*. Jakarta
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK. 01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan*. Jakarta

- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 4th Edition. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Sihaloho, F. L. dan A. Halim. 2005. *Pengaruh Faktor-Faktor Rasional, Politik dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. Paper dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi SNA VIII, Solo, 15-16 September 2005.
- Sugiyono 2010. *Metode riset kualitatif*. Afabeta. Bandung.
- Soebagio, P. 2016. Penajaman Peran Strategis DJKN Sebagai Pengelola Piutang Negara/Daerah Dalam Perspektif Transformasi Kelembagaan DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/9547/Penajaman-Peran-Strategis-DJKN-Sebagai-Pengelola-Piutang-NegaraDaerah-Dalam-Perspektif-Transformasi-Kelembagaan-DJKN.html>. Diakses 24 Mei 2019.
- Sofyani, H., and R. Akbar. 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI)*, Vol.10, No.2, p.184-205 <http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/view/193>
- Sofyani, H., and R. Akbar. 2015. "Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Isomorfisma Institutional". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, Vol.19, No.2, p.153-173.
- Sofyani, H., Rusdi Akbar and R.D. Ferrer. 2018. "20 Years of Performance Measurement System (PMS) Implementation in Indonesian Local Governments: Why is Their Performance Still Poor?". *Asian Journal of Business and Accounting (AJBA)*, Vol.11, No.1, p.151-183.

Suwandi, A.P. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Yin, R.K. 2012. Studi Kasus Desain dan Metode Edisi 1. Penerjemah: M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Rajawali Pers.